

**PERANAN AUDIT INTERN DALAM PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* YANG EFEKTIF”**  
**(Studi Kasus PT. XYZ, Bandung)**

*Christine Dwi Karya Susilawati, S.E., M.Si., Ak.*  
*Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha*

*Felix Hendra Soetjipta*  
*Alumni Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha*

Akurat  
Jurnal Ilmiah Akuntansi  
ISSN:2086-4159  
Nomor 10 Tahun ke-3 Bulan Mei-Agustus 2013

**ABSTRACT**

*Good corporate governance systems provide effective protection to shareholders and creditors, so they can convince him to earn back its investment with a reasonable and valuable. An effective corporate governance system should be able to regulate the authority of the board of directors, which aims to hold directors to not misuse the authority and to ensure that the directors work solely for the benefit of the company. Corporate governance focuses on the fundamental issues that will be useful for assessing the performance of directors based on the interests of the shareholders best interest. Ineffective corporate governance is the cause of the economic crisis and the failure of various companies in Indonesia. According to Hiro Tugiman public company on the stock exchange is one of the backbone of the national economy, and is expected to be exemplary in implementing effective corporate governance. Public companies provide a very important contribution in improving the condition of the economy and economic crisis and the failure avoid future. To assist companies in assessing and reviewing the implementation of GCG, then formed an internal audit team which aims to carry out an examination of the related object. Based on the description above, the authors propose the following hypothesis: "adequate internal audit have a role in implementing the embodiment of effective corporate governance". Research methods used in the preparation of this paper is descriptive method of analysis with a case study approach. Authors find, collect, present, interpret, and analyze the data so as to provide a clear picture is quite clear that the object under study and then a conclusion can be drawn by comparing between theory and actual practice. Based on the results of questionnaires and testing hypotheses, Pearson correlation coefficient values obtained for 0,263, meaning that the internal audit and internal control of inventory is a positive relationship as low as 0,263. The conclusion of this study shows the results of 0.016>*

0.05 indicates rejection of  $H_0$  or  $H_1$  is accepted. Based on the results of research and discussion, the authors draw the conclusion that the internal audit in PT XYZ have adequate and instrumental in implementing embodiments of effective corporate governance.

*Keywords: good corporate governance, internal audit.*

## **Pendahuluan**

Perusahaan memainkan peranan penting dalam kehidupan, karena menjalankan fungsi – fungsi produksi dan distribusi barang dan jasa. Perusahaan juga memiliki peranan penting karena terlibat secara langsung dalam proses alokasi sumber daya yang bersifat ekonomis bagi masyarakat. Peranan ini sangat penting mengingat keberadaan sumber daya yang bersifat ekonomis sangat terbatas dan oleh karenanya harus dapat dialokasikan seoptimal mungkin.

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya akan dipengaruhi oleh suatu kerangka tata kelola (*corporate governance framework*). Agar perusahaan memiliki kelangsungan jangka panjang, *shareholders* dan *stakeholders* perlu mempertimbangkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Pada kondisi perekonomian seperti yang terjadi pada saat ini, pengelolaan perusahaan telah dianggap penting sebagaimana telah diterapkan pada pemerintah suatu negara. Pernyataan diatas telah menegaskan kedudukan penting perusahaan – perusahaan dalam menjalankan peran mereka dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

Secara luas pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi antara hukum, peraturan pendaftaran dan praktek pribadi yang memungkinkan perusahaan tersebut menarik modal masuk, berkinerja secara efisien, menghasilkan keuntungan dan memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Istilah “pengelolaan perusahaan” berkaitan dengan hubungan antara pengelola, direktur, dan pemegang saham dari perusahaan. Istilah tersebut juga dapat mencakup hubungan antara perusahaan itu sendiri dengan pembeli saham dan masyarakat.

Suatu survei pada tahun 1999 oleh Pricewaterhouse Coopers terhadap investor – investor internasional di Asia, menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang standar – standar akuntansi dan penataan, pertanggung jawaban terhadap para pemegang saham, standar – standar pengungkapan dan transparansi serta proses – proses kepengurusan perusahaan. Di Indonesia, kepemilikan perusahaan yang tidak terdaftar di bursa saham sangat terpusat, dan persentase manajer yang termasuk dalam grup pengendali juga sangat tinggi. Perhatian terhadap standar – standar *corporate governance* yang disepakati ditingkat internasional merupakan keharusan bagi perusahaan Indonesia.

Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditor, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Suatu sistem *corporate governance* yang efektif seharusnya mampu mengatur kewenangan direksi, yang bertujuan dapat menahan direksi untuk tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut dan untuk memastikan bahwa direksi bekerja semata-mata untuk kepentingan perusahaan. *Corporate governance* memusatkan perhatian pada isu fundamental yang akan berguna untuk menilai kinerja direksi berdasarkan kepentingan berdasarkan kepentingan pemegang saham.

*Corporate governance* yang tidak efektif merupakan penyebab terjadinya krisis ekonomi

dan kegagalan berbagai perusahaan di Indonesia. Menurut Hiro Tugiman perusahaan publik di bursa saham merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, dan diharapkan dapat menjadi teladan dalam menerapkan *corporate governance* yang efektif. Perusahaan publik memberikan sumbangan yang sangat penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian serta menghindari krisis ekonomi dan kegagalan dimasa depan.

*Corporate governance* didefinisikan sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Menurut Messier et al. (2005:514), definisi audit intern adalah:

"audit intern adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan kondisi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi dan tujuan organisasi. Audit ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin ilmu untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola."

Berdasarkan pengertian diatas nampak bahwa pelaksanaan audit intern sangat berperan bagi manajemen yang telah menerapkan pengendalian intern yang merupakan bagian dari suatu perusahaan terutama BUMN.

Penerapan GCG telah menjadi kebutuhan yang nyata bagi peningkatan kinerja BUMN. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kontribusi BUMN terhadap keterpurukan keuangan dan moneter negara sangat signifikan atas dasar hal tersebut sepanjang tahun 2002, pemerintah memberlakukan beberapa peraturan kewajiban untuk menerapkan *corporate governance* dilingkungan BUMN.

Penelitian ini akan mencoba meneliti apakah pelaksanaan audit intern yang diterapkan dapat memotivasi manajemen untuk mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan yaitu **P.T. XYZ**

Bila pelaksanaan audit intern dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung terwujudnya *Good Corporate Governance* berarti ada dukungan dari dalam perusahaan itu sendiri untuk mewujudkan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui sejauh mana hubungan pelaksanaan audit intern dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada **P.T. XYZ**. Penulis merumuskan penelitian ini dengan judul:

**“Peranan Audit Intern Dalam Penerapan *Good Corporate Governance* Yang Efektif”.**

## **Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis Pelaksanaan Audit Intern**

The Institute of Intern Auditors ( IIA ) (1995:39-59) mengemukakan pelaksanaan audit intern, sebagai berikut:

*“Performance of audit work should include: Planning the audit, Examining and evaluation information, Communicating result, Following up”.*

Pengertian empat langkah kerja pelaksanaan audit intern diatas menurut Tugiman (1997:53-78) adalah sebagai berikut:

- I. Perencanaan harus didokumentasikan dan mencakup
  - a. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup pekerjaan,
  - b. Mendapatkan informasi mengenai aktivasi yang diperiksa,
  - c. Menentukan sumber – sumber yang penting dalam melaksanakan audit,
  - d. Mengkomunikasikan dengan pihak – pihak tertentu,
  - e. Melakukan *survey* langsung,
  - f. Menulis program audit,
  - g. Menentukan kapan, kepada siapa hasil audit dikomunikasikan,
  - h. Mendapatkan persetujuan dan perencanaan pekerjaan audit.
  
- II. Proses
  - a. Seluruh informasi yang berhubungan dengan tujuan dan ruang lingkup dikumpulkan,
  - b. Prosedur audit termasuk teknik pengujian dan sample harus dipilih,
  - c. Proses pengumpulan analisis dan interpretasi serta dokumentasi harus diawasi untuk memelihara objektivitas.
  
- III. Audit intern harus melaporkan hasil audit
  - a. Laporan ditulis setelah pekerjaan audit selesai,
  - b. Audit intern harus mendiskusikan kesimpulan – kesimpulan dan rekomendasi – rekomendasi dengan pihak manajemen,
  - c. Laporan harus objektif dan jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu,
  - d. Laporan mencakup rekomendasi untuk pemeliharaan dan pernyataan keberhasilan pelaksanaan disertai tindakan koreksi,
  - e. Laporan menyatakan tujuan, ruang lingkup, dan hasil pemeriksaan.
  
- IV. Pemeriksa intern harus melakukan tindak lanjut untuk memastikan tindakan yang pantas dilakukan.

### **Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

Menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), ada 4 unsur penting dalam *corporate governance*, yaitu (OECD,1998):

#### **1. *Transparency* (Transparansi)**

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

#### **2. *Fairness* (Keadilan)**

Keadilan menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

#### **3. *Accountability* (Akuntabilitas)**

Akuntabilitas menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin keseimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris ( dalam *Two Tiers System*).

#### **4. Responsibility (Pertanggungjawaban)**

Pertanggungjawaban memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Menurut Amin Wijaya Tunggal (2007:6) terdapat enam (6) prinsip *Corporate Governance*

##### **1. Transparency / Keterbukaan.**

Pengungkapan informasi kinerja perusahaan baik ketetapan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses, *decision making, control, fairness, quality, standardization, efficiency time and cost*).

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Dengan transparansi, pihak – pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan – keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa masalah – masalah strategik harus dipublikasikan, sehingga akan mengurangi keunggulan bersaing perusahaan.

##### **2. Independency / Kemandirian.**

Kemandirian adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Dalam hal ini ditekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, Komisaris, Direksi dan Manajer atau pihak – pihak yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan perusahaan, terbebas dari tekanan ataupun pengaruh baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.

##### **3. Accountability / Akuntabilitas.**

Penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *Board of Commissioners, Board of Directors, Shareholders dan Auditor* (pertanggungjawaban wewenang, *traceable, reasonable*). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas – tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh Organ Perseroan. Dalam hal ini Direksi (beserta manajer) bertanggungjawab atas keberhasilan pengurusan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah disetujui oleh pemegang saham.

Komisaris bertanggungjawab atas keberhasilan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam rangka pengelolaan perusahaan. Pemegang Saham bertanggungjawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

##### **4. Responsibility / Pertanggungjawaban.**

Pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada.

##### **5. Fairness / Keadilan.**

Perlindungan kepentingan *minority shareholders* dari penipuan, kecurangan, perdagangan dan penyalahgunaan oleh orang dalam (*selfdealing* atau *insider trading*). Keadilan adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak – pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini ditekankan agar pihak – pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang dalam.

##### **6. Disclosure / Keterbukaan dalam informasi.**

Disclosure adalah keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. *Discloruse* erat kaitannya dengan transparansi, yaitu perusahaan harus

dapat memberikan informasi atau laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

**1. *Transparency* (Transparansi)**

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

**2. *Fairness* (Keadilan)**

Keadilan menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

**3. *Accountability* (Akuntabilitas)**

Akuntabilitas menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris ( dalam *Two Tiers System*).

**4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)**

Pertanggungjawaban memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

**5. *Disclosure* (Keterbukaan dalam informasi)**

Disclosure adalah keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. *Discloruse* erat kaitannya dengan transparansi, yaitu perusahaan harus dapat memberikan informasi atau laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan.

**6. *Independency* / Kemandirian.**

Kemandirian adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Dalam hal ini ditekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, Komisaris, Direksi dan Manajer atau pihak – pihak yang diberi tugas untuk mengalola kegiatan perusahaan, terbebas dari tekanan ataupun pengaruh baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.

**Unsur – Unsur *Good Corporate Governace***

Unsur – unsur dalam *good corporate governance* menurut Tunggal (2002:36-49) dan juga menurut IAI Indonesia (2004:2-3), terdiri atas:

1) Pemegang saham dan RUPS.

Hak pemegang saham harus dilindungi, agar pemegang saham dapat melaksanakannya berdasarkan prosedur yang benar dan ditetapkan oleh perusahaan, sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Hak – hak para pemegang saham pada dasarnya adalah:

- i. Mengamankan registrasi dan kepemilikan saham,
- ii. Menyerahkan atau memindahkan saham,
- iii. Mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu dan kontinyu,
- iv. Ikut serta dan memiliki hak suara dalam RUPS,
- v. Menerima keuntungan sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya.

Dalam RUPS pemegang saham harus menetapkan

- Pengangkatan anggota, dewan komisaris, dan dewan direksi perusahaan,
- Penetapan gaji dan tunjangan anggota dewan komisaris dan direksi perusahaan,
- Penilaian kinerja mereka.

## 2) Dewan komisaris.

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang dalam mengawasi tindakan direksi, dan jika perlu dapat memberikan nasihat kepada direksi.

Fungsi dewan komisaris yaitu sebagai wakil pemegang saham dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan perusahaan yang baik.

Tugas dan tanggungjawab dewan komisaris:

- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus perusahaan yang dilakukan direktur serta memberikan nasihat kepada direksi termasuk mengenai rencana pembangunan perusahaan, pelaksanaan ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan serta perubahan dan tambahannya.

Mengawasi pelaksanaan kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian dan pendapatnya kepada RUPS.

Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan yang lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan perusahaan.

Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.

Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dan dalam rapat tersebut Komisaris dapat mengundang Direksi.

## 3) Direksi

Direksi bertugas untuk mengelola perusahaan. Direksi wajib mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan perusahaan dan Direksi harus memastikan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan *stockholders*.

## 4) Eksternal Auditor

Eksternal auditor harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit. Eksternal audit bertanggung jawab memberikan opini atau pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan eksternal auditor adalah bentuk dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan tanggung jawab manajemen, tetapi eksternal auditor bertanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan audit mereka.

## 5) Komite Audit

Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit beranggotakan satu atau lebih Dewan

Komisaris. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang sekaligus, seorang diantaranya merupakan Komisaris independen perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern perusahaan yang independen dimana setidaknya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit :

Mendorong terbentuknya pengendalian intern yang memadai;

Meningkatkan kualitas keterbukaan dalam laporan keuangan;

Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, kewajiban biaya eksternal audit serta kemandirian dari objektivitas eksternal audit.

Mempersiapkan surat (ditandatangani ketua Komite Audit) yang menguraikan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh eksternal auditor, surat tersebut disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham.

#### 6) Auditor Intern

Didalam perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *A Good Corporate Governance*, fungsi audit intern antara lain berperan dalam :

1) Membantu manajemen dalam menilai resiko-resiko utama yang dihadapi perusahaan dan memberikan nasihat kepada manajemen.

2) Mengevaluasi struktur pengendalian intern dan bertanggung jawab kepada Komite Audit.

3) Menelaah peraturan *Corporate Governance* minimal setahun sekali.

#### 7) Sekretaris Perusahaan

Sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang pejabat perusahaan yang khusus untuk melaksanakan fungsinya. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi perusahaan.

#### 8) Manajer dan Pekerja

Manajer bertanggung jawab untuk :

1) Kelangsungan hidup perusahaan.

2) Memperpanjang umur perusahaan ke masa depan melalui inovasi, pengembangan manajemen, ekspansi pasar, serta cara lain yang dapat digunakan untuk memberikan nilai tambah kepada perusahaan.

3) Menyeimbangkan permintaan dari seluruh kelompok dengan cara sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya

#### 9) *Stakeholders* Lainnya

*Stakeholders* diberi kesempatan untuk memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan masukan kepada Direksi mengenai hal tersebut. Perusahaan juga harus memberikan informasi yang diperlukan oleh *stakeholders* demi kepentingan bersama.

Pemerintah terlibat dalam *A Good Corporate Governance* melalui hukum dan peraturan

perundang-undangan. Kreditor yang memberi pinjaman mungkin juga mempengaruhi kebijakan perusahaan.

### **Karakteristik GCG**

UNDP (2007:8) mengidentifikasi sejumlah karakteristik dari *good corporate* yang bias dijadikan ukuran, apakah telah tercapai *good governance* tersebut. Karakteristik – karakteristik tersebut adalah:

- *Equality*, semua orang, laki – laki, perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.
- Supremasi hukum, dalam negara yang mengatur adalah hukum yang adil, *fair* dan tidak memihak. Semua orang termasuk pemerintah harus tunduk kepada aturan – aturan hukum.
- Transparansi, proses pengambilan keputusan harus terbuka, dan ada akses yang sama terhadap segala informasi terhadap masyarakat.
- Akuntabilitas, proses pengambilan keputusan harus bisa dimonitor dan dikritisi, yaitu para pengambil keputusan harus dapat mempertanggungjawabkan.
- *Responsiveness*, semua instansi dan lembaga mendengar, mempertimbangkan dan merespon tuntutan – tuntutan masyarakat dan opini publik yang berkembang.
- Partisipasi sebanyak mungkin dari masyarakat, langsung atau tidak langsung, terjadi dalam proses pengambilan keputusan publik.
- *Effectiveness*, keseluruhan proses pengambilan keputusan berlangsung dengan cara – cara yang cepat, murah dan sederhana.

*Good Governance* dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Good Government Governance* (GGG). *Good Corporate Governance* adalah penerapan *Good Governance* disektor swasta, sedangkan *Good Government Governance* adalah penerapan *Good Governance* di birokrasi negara. Kedua kelompok *Good Governance* tersebut merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. GCG hanya dapat diterapkan lingkungan dimana pemerintahan atau birokrasi negara telah menerapkan GGG, demikian sebaliknya, ggg tidak mungkin terealisasi tanpa dukungan GCG.

Bentuk hukum model *governance* di Indonesia berbeda dengan yang digunakan di Amerika, Inggris, dan Australia. Indonesia menggunakan model *governance* yang dipakai di negara Belanda. Berdasarkan UU No.1/1995 tentang “Perseroan Terbatas”, perkataan “Komisaris” mengandung pengertian baik sebagai “organ” maupun sebagai “orang perseorangan”. Sebagai organ, Komisaris lazim disebut “Dewan Komisaris”, sedangkan sebagai “orang perorangan” disebut “anggota komisaris”.

### **Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis**

Di Indonesia, isu *corporate governance* muncul setelah krisis tahun 1997 yang mengakibatkan operasi perusahaan tersendat, nilai hutang swasta dan pemerintah membengkak dan investor asing maupun perusahaan asing enggan masuk ke Indonesia, dan banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Penyebab terbesar kebangkrutan tersebut adalah pengelolaan perusahaan yang buruk.

Krisis yang melanda Indonesia ini tidak lepas dari pengaruh lemahnya penerapan *good corporate governance*. Minimnya perlindungan pemegang saham minoritas menyebabkan

hilangnya kepercayaan investor, terutama investor asing untuk tetap memegang saham – saham perusahaan publik di Indonesia.

Hal ini ditandai dengan kurangnya transparansi suatu perusahaan dalam mengelola sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah dan terkonsentrasi, pemegang saham besar pada beberapa keluarga menyebabkan campur tangan pemegang mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik berkepentingan yang sangat menyimpang dari norma – norma tata kelola perusahaan yang baik.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh sektor *corporate* menerapkan *good governance* adalah memperbaiki keterbukaan informasi dan dalam jangka panjang memperbaiki perangkat hukum. Kondisi ini masih sangat sulit diterapkan di Indonesia mengingat banyaknya praktik kecurangan dan praktik bisnis yang melanggar kaidah *good corporate governance*.

*Corporate governance* adalah salah satu aspek perhitungan yang cukup signifikan saat ini. Dengan perkembangan globalisasi yang ditandai dengan perkembangan dari teknologi dan dunia informasi membuat batasan dari tembok pemisah negara – negara semakin tipis. *Corporate governance* bermula dari konsep akuntabilitas atas asset dan sumber – sumber yang dipercayakan kepada manajemen. Pada saat perusahaan masih nol, para karyawan dengan mudah mempertanggungjawabkan tindakan kepada atasan atau pemilik perusahaan. Dalam keadaan seperti ini akuntabilitas relative mudah dikelola, dimana jalur komunikasi biasanya pendek dan langsung. Semakin besar perusahaan, pemilik dan manajemen mempunyai jarak yang jauh, dan dewan komisaris merupakan mediator (intuisi) yang menjembatani kedua belah pihak tersebut. Disinilah isu akuntabilitas menjadi sangat penting. Dalam konteks ini dewan komisaris merupakan jembatan penghubung antara pemegang saham atau pemilik dengan eksekutif, manajer dan karyawan lain dalam organisasi.

Pada KEP-117/M-MBU/2002 pasal 1 disebutkan bahwa pengertian *Good Corporate Governance* yaitu :

“*Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.”

Tujuan dari *corporate governance* adalah “untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”. Secara lebih rinci, terminologi *corporate governance* dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan direksi, dewan komisaris, pengurus (pengelola) perusahaan, dan para pemegang saham.

Sebagaimana yang diuraikan oleh OECD (Organization for Economic Co-operation and Development, 1998), ada empat unsur penting dalam *Corporate Governance*, yaitu:

- **Fairness** (Keadilan). Menjamin perlindungan hak – hak para pemegang saham, termasuk hak – hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- **Transparency** (Transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kepemilikan perusahaan.
- **Accountability** (Akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin keseimbangan kepentingan manajemen dan

pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam Two Tiers System).

- **Responsibility** (Pertanggungjawaban). Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai – nilai sosial.

Jadi dapat disimpulkan prinsip – prinsip *corporate governance* dari OECD menyangkut hal – hal sebagai berikut:

1. Hak – para pemegang saham,
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham,
3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam *corporate governance*,
4. Transparansi dan penjelasan,
5. Peranan dewan komisaris.

Berikut ini merupakan contoh kasus dalam P.T. Astra Internasional.

Sebelum tahun 1992 keluarga Soeryadjaya adalah pemegang saham mayoritas P.T. Astra Internasional. Perusahaan ini menerapkan *corporate governance* dengan baik walaupun kepemilikan saham mayoritas terpusat ditangan satu keluarga saja. Sejak tahun 1984 P.T. Astra telah memperkenalkan budaya perusahaan berdasarkan Catur Dharma (Empat Sikap). Catur Dharma terdiri dari:

1. Menjadi milik yang bermanfaat bagi Bangsa dan Negara,
2. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan,
3. Saling menghargai dan membina kerja sama, dan
4. Berusaha mencapai yang terbaik.

Catur Dharma ini ditindaklanjuti oleh perusahaan dengan memperkenalkan Pedoman Etika Bisnis Astra pada tahun 1985. Pada tahun 1999 P.T. Astra menyusun Aspek Korporasi untuk melaksanakan *corporate governance* yang baik yang harus ditaati oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Ada empat unsur yang tercakup dalam *corporate governance* yang ada di P.T. Astra, yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Pada tahun 1990, P.T. Astra terdaftar pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan indeks BEJ pada tingkat paling tinggi mencapai Rp. 33.000,00 per saham dengan harga IPO (emisi perdana) Rp. 14.850,00. Pada tahun itu pula, P.T. Astra meraih penghargaan Piagam Manajemen “Manajemen Pengoperasian” dari Asian Institute of Management. Hingga tanggal 30 April 2000, pemegang saham mayoritas P.T. Astra adalah Cycle & Carriage (Mauritius) Ltd. (CCL), dengan total saham 24,14%

Salah satu contoh bahwa *corporate governance* dilaksanakan adalah adanya pengendalian manajemen P.T. Astra baik ditingkat komisaris maupun direksi. Dimana yang menjabat sebagai dewan komisaris maupun dewan direksi mayoritas adalah tenaga – tenaga profesional yang independen yang pada dasarnya sudah terjadi sebelum maupun sesudah tahun 1992. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dalam Code For Good *Corporate Governance* yang menganjurkan paling sedikit 20% dari anggota dewan komisaris maupun dewan direksi adalah anggota independen.

P.T. Astra menyadari pentingnya dilaksanakan *good corporate governance* (GCG), dimana dewan komisaris maupun dewan direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan GCG dengan dibantu oleh semua divisi P.T. Astra. Disamping itu terdapat Komisaris Independen dan Komite Audit sebagai lembaga pendukung untuk memastikan bahwa *corporate governance* telah dilaksanakan dengan baik dilingkungan P.T. Astra.

Terbukti dengan dilaksanakannya *corporate governance* yang baik di P.T. Astra, perusahaan tersebut dapat bertahan dan berkembang sekalipun ada krisis politik dan ekonomi membuat pendapatan konsolidasi perusahaan turun, tapi tidak menjatuhkan perusahaan. Oleh karena penerapan *good corporate governance* maka P.T. Astra Internasional masih tetap menjadi yang terdepan.

Yeh, Lee, dan Woidtke (2001:48) melaporkan perusahaan keluarga yang memiliki tingkat kontrol tinggi akan memiliki kualitas kinerja keuangan yang rendah, dibandingkan perusahaan keluarga yang memiliki tingkat kontrol yang rendah dan telah dimiliki secara luas oleh publik. Lebih lanjut, mereka menemukan bahwa nilai perusahaan lebih tinggi ketika pengendali perusahaan menempatkan wakilnya dalam jajaran manajemen dan jumlahnya hanya minoritas saja. Pengendali perusahaan disini maksudnya adalah adanya auditor intern yang bersifat independen.

Satu keuntungan dengan hadirnya audit intern adalah kemampuannya dalam memonitor dan mendisiplinkan manajemen, auditor intern memungkinkan manajemen untuk memberikan laporan keuangan secara berkala. Hal ini tampaknya dapat memberikan pemecahan masalah – masalah utama seputar *corporate governance* yang timbul akibat tindakan buruk yang dilakukan pihak manajemen, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi para pemegang saham publik.

Audit intern sebenarnya berada dalam posisi untuk mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi kepentingannya dengan beban yang juga ditanggung para pemegang saham lainnya. Audit intern perusahaan seringkali merasa bahwa menerapkan *corporate governance* secara sukalera tidak memberikan keuntungan, apabila perusahaan pesaingnya tidak melakukan hal yang serupa, misalnya meningkatkan transparansi secara konsisten, termasuk memberikan informasi – informasi negatif perusahaan tentunya akan memberikan dampak buruk bagi perusahaan.

Konsep awal *corporate governance* menghendaki perusahaan mampu lebih akuntabel dan transparan kepada *stakeholders*. Jadi, yang diharapkan dari *corporate governance* adalah proses dari dalam perusahaan untuk secara transparan dan bertanggungjawab merealisasikan tujuan perusahaan dengan dibantu oleh audit intern (Surya, 2006: 63).

Pengertian pemeriksaan (audit) intern menurut Tugiman (2001:11) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan (audit) intern adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan, dengan tujuan membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, auditor intern akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan audit juga mencakup pada pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.”

Independensi ini diperlukan agar hasil pemeriksaan tidak dipengaruhi oleh pandangan subjektif pihak yang diperiksa. Pentingnya independensi ini karena audit intern merupakan aktivitas profesional yang memerlukan integritas dan objektivitas yang tinggi serta pribadi yang tidak mudah dipengaruhi. Tanpa independensi, hasil audit intern yang diharapkan tidak akan dapat diwujudkan secara optimal (Tugiman, 2001:12).

Fungsi audit intern yang independen dapat membantu manajemen secara efektif dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan atas kejadian dalam suatu perusahaan. Fungsi audit intern juga menjamin bahwa kondisi dan kejadian yang dilaporkan adalah benar, sehingga

tindakan dan pengambilan keputusan manajemen dapat dilakukan sebaik-baiknya maka diperlukan suatu laporan yang menggambarkan kegiatan yang terjadi dalam suatu perusahaan, sehingga hasil suatu perusahaan akan tercermin dalam laporan tersebut (Tugiman, 2001:21).

Perusahaan memerlukan suatu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui apakah penerapan *good corporate governance* telah berjalan dengan efektif. Fungsi pemeriksaan ini dilakukan oleh suatu staf audit yang merupakan bagian dari pengendali perusahaan itu sendiri, yaitu intern audit. Fungsi intern audit ini harus independen dari pihak yang diperiksa sehingga hasil auditnya tidak dipengaruhi oleh pandangan subyektif pihak yang diperiksa. Dukungan manajemen sangat diperlukan dalam menentukan hubungan antara petugas intern audit dengan bagian-bagian lainnya untuk menghindari salah pengertian dalam kedudukan masing-masing.

Pentingnya fungsi intern audit bagi suatu perusahaan telah dikemukakan oleh *General Accounting Office (GAO)* dan dikutip oleh Cashin & James (1998:121) sebagai berikut:

1. Menemukan berbagai situasi untuk meniadakan pemborosan dan inefisiensi.
2. Menyarankan perbaikan dalam bidang kebijaksanaan, prosedur, dan struktur organisasi.
3. Menciptakan alat-alat penguji terhadap hasil pekerjaan para individu dan berbagai unit organisasi.
4. Mengawasi ketaatan pada syarat-syarat yang ditentukan oleh anggaran dasar dan undang-undang.
5. Mengecek adanya tindakan-tindakan yang tidak atau belum disetujui, yang menyeleweng dan tindakan yang tidak sesuai lainnya.
6. Mengidentifikasi tempat-tempat yang mengandung kemungkinan timbulnya kesulitan dalam kegiatan di masa depan.
7. Menciptakan saluran komunikasi antara berbagai tingkat kegiatan.

Berdasarkan rerangka pemikiran diatas, maka penulis menarik suatu hipotesa yaitu sebagai berikut: **"Audit intern yang memadai mempunyai peranan dalam penerapan *good corporate governance* yang efektif"**.

## **METODA PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Objek dari penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah PT. XYZ. PT. XYZ merupakan perusahaan swasta yang bergerak sebagai pabrik mesin logam dan kontruksi, yang terletak di JL. Industri II No. 10, Kompl. Industri Leuwigajah Cimahi, Bandung.

### **Metoda Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metoda studi kasus dengan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metoda yang berusaha untuk mencari, mengumpulkan, menyajikan, menginterpretasikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dengan membandingkan antara teori dan praktek yang sebenarnya (Irdiantoro,2002:27).

### **Operasionalisasi Variabel**

Sesuai dengan hipotesis yang diambil yaitu ”**Audit intern yang memadai mempunyai peranan dalam penerapan good corporate governance yang efektif**”, maka terdapat dua variabel penelitian yaitu (Irdiantoro,2002:63):

1. Variabel bebas (independent variabel)

Suatu variabel digolongkan sebagai variabel bebas apabila hubungannya dengan variabel lain, variabel tersebut berfungsi untuk menerangkan atau mempengaruhi keadaan variabel yang lainnya atau menjadi sebab terhadap terjadi atau tidaknya sesuatu. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah “**audit intern.**”

2. Variabel tidak bebas (dependent variabel)

Suatu variabel digolongkan ke dalam variabel tidak bebas apabila dalam hubungannya dengan variabel lain, keadaan variabel tersebut diterangkan atau dipengaruhi oleh variabel yang diharapkan atau yang menjadi akibat dari terjadinya sesuatu. Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah “**efektivitas good corporate governance.**”

**Pengujian Data**

Data memiliki keandalan yang sangat penting karena data merupakan gambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya suatu hasil penelitian. Di lain pihak, benar tidaknya data tergantung pada baik tidaknya instrument pengumpulan data. Kuesioner yang baik harus memenuhi dua syarat yaitu valid dan reliabel. Hal ini dilakukan agar data yang digunakan merupakan data yang sah dan andal (Sutrisno, 1991:11).

**Uji Validitas**

Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur(Santoso,2004). Pengujian validitas pada penelitian ini adalah validitas konstruk, sebab digunakan untuk membuktikan seberapa bagus hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran sesuai dengan teori di mana pengujian dirancang.

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan Analysis Factor. Suatu data dikatakan valid bila loading factor > 0.4.

**Hasil Pengujian Validitas**

<b>Variabel</b>	<b>No. Kasus Valid</b>	<b>Loading Factor</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Audit Intern (independen)</b>	1.	0.412	valid
	2.	0.612	valid
	3.	0.522	valid
	11.	0.627	valid
	14.	0.445	valid
	15.	0.454	valid
	16.	0.406	valid
	17.	0.520	valid
	18.	0.467	valid
	20.	0.587	valid

	25.	0.730	valid
	27.	0.592	valid
	30.	0.592	valid
<b>GCG</b>	2.	0.535	valid
<b>( dependen )</b>	3.	0.645	valid
	10.	0.475	valid
	11.	0.758	valid
	12.	0.708	valid
	14.	0.598	valid
	15.	0.579	valid
	16.	0.471	valid
	17.	0.501	valid
	18.	0.474	valid
	19.	0.494	valid
	20.	0.740	valid
	23.	0.579	valid
	25.	0.521	valid
	26.	0.503	valid
	31.	0.512	valid
	33.	0.645	valid

Sumber: hasil penelitian

### Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran).. Pengujian reliabilitas pada pengujian ini menggunakan konsistensi intern ukuran. Konsistensi intern ukuran merupakan indikasi homogenitas item-item yang ada dalam ukuran yang menyusun konstruk. Item-item yang ada harus “sama” dan harus mampu mengukur konsep yang sama secara independen sehingga responden seragam dalam mengartikan setiap item (Santoso,2004).

Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas yang secara teoritis nilainya berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Analisis ini dilakukan dengan Cronbach Alpha. Suatu instrumen dikatakan reliabel bila: Cronbach Alpha > 0.6.

Berdasarkan hasil pengujian data menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Hasil Pengujian Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Audit Intern	0.8150	Reliabel
GCG	0.9138	Reliabel

Sumber: hasil penelitian

### Rancangan Pengujian Hipotesis

Langkah pertama dalam prosedur pembuatan keputusan mengenai pengujian kedua variabel diatas adalah menetapkan hipotesis nolnya ( $H_0$ ), apabila  $H_0$  ditolak maka hipotesis pengganti ( $H_1$ ) dapat diterima,  $H_1$  merupakan hipotesis penelitian dari penulis. Hipotesis tersebut dinyatakan sebagai berikut:

$H_0$ : Audit intern yang memadai tidak mempunyai peranan dalam melaksanakan perwujudan good corporate governance yang efektif.

$H_1$ : Audit intern yang memadai mempunyai peranan dalam melaksanakan perwujudan good corporate governance yang efektif.

### Uji Statistik

Pengujian hipotesis akan dilakukan berdasarkan kuesioner yang akan diajukan kepada pihak yang berwenang dalam pelaksanaan audit intern atas pelaksanaan good corporate governance. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis melakukan analisa untuk mengetahui bagaimana peranan audit intern yang memadai dalam melaksanakan perwujudan good corporate governance yang efektif. Penulis melakukan penilaian hasil kuesioner dengan metode korelasi pearson karena koefisien ini mengukur keeratan hubungan di antara hasil-hasil pengamatan dari populasi. Perhitungan korelasi ini bisa digunakan untuk menghitung koefisien korelasi pada data interval dan penggunaan asosiasi pada statistik parametrik (Santoso, 2004:315).

Koefisien korelasi pearson digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio (Hasan, 2002: 235). Penelitian ini menggunakan skala likert karena mempelajari bagaimana respon berbeda dari satu orang ke orang lain dan bagaimana respon berbeda antara berbagai objek. Skala likert diperlakukan sebagai skala interval Koefisien korelasi pearson dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Hasan, 2002,235):

$$r = \frac{n\Sigma XY - \Sigma X \Sigma Y}{\sqrt{(n\Sigma^2 - (\Sigma X)^2)(n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)}}$$

Keterangan:

r = Nilai koefisien korelasi pearson

X = Variabel bebas

Y = Variabel Terikat

Nilai koefisien korelasi (r) terletak antara -1 dan +1 ( $-1 \leq r \leq +1$ )

1. Jika  $r = +1$ , terjadi korelasi positif sempurna antara variabel X dan Y.
2. Jika  $r = -1$ , terjadi korelasi negatif sempurna antara variabel X dan Y.
3. Jika  $r = 0$ , tidak terdapat korelasi antara variabel X dan Y.

4. Jika  $0 < r < +1$ , terjadi korelasi positif antara variable X dan Y.
5. Jika  $-1 < r < 0$ , terjadi korelasi negatif antara variable X dan Y

Skor penilaian untuk audit intern dan pengendalian intern adalah:

- a. Sangat tidak setuju = 1.
- b. Tidak setuju = 2.
- c. Netral = 3.
- d. Setuju = 4.
- e. Sangat setuju = 5.

### Penetapan Tingkat Signifikan

Taraf nyata ( $\alpha$ ) adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula tinggi penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji. Taraf nyata yang digunakan adalah 5% (0.05) (Hassan, 2002,142).

### Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah (Hasan,2004:88):

$H_0$  ditolak jika  $\rho \text{ value} \leq 0.05$

$H_0$  diterima jika  $\rho \text{ value} > 0.05$

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Instrumen yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 29 Januari 2008 dan dibagikan kepada karyawan P.T XYZ Bandung. Kuesioner yang telah diisi kemudian diuji validitas dan reliabel seperti dijelaskan dalam bab III.

Uji statistik pada penelitian ini menggunakan korelasi *pearson*, dengan hasil sebagai berikut:

### Correlations

		TOTALA	TOTALB
TOTALA	Pearson Correlation	1	.263
	Sig. (2-tailed)	.	.016
	N	30	30

TOTALB	Pearson Correlation	.263	1
	Sig. (2-tailed)	.016	.
	N	30	30

Berdasarkan hasil pengujian korelasi *pearson*, pada bagian kedua output (kolom *sig 2-tailed*) untuk korelasi variabel X (audit intern) dan Y (pengendalian intern persediaan) menunjukkan hasil sebesar  $0.016 < 0.05$  berarti  $H_0$  ditolak, maka  $H_1$  diterima, berarti "Audit intern yang memadai mempunyai peranan dalam melaksanakan perwujudan *good corporate governance* yang efektif". Penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan audit intern terhadap perwujudan *A Good Corporate Governance* pada PT. XYZ telah efektif dengan terpenuhinya kriteria-kriteria yang dapat menciptakan audit intern yang memadai dan terwujudnya *a good corporate governance*.

Besarnya pengaruh audit intern dalam mewujudkan *good corporate governance* yang efektif dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KD = r_s^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,263^2 \times 100\%$$

$$KD = 6,92 \%$$

Artinya pengaruh audit intern dalam mewujudkan *good corporate governance* yang efektif sebesar 6,92% dan sisanya sebesar 93,08% adalah pengaruh faktor lain selain audit intern.

Nilai koefisien korelasi *pearson* menghasilkan angka sebesar 0.263 berarti antara variabel X (audit intern) dan Y (pengendalian intern persediaan) menunjukkan hubungan korelasi positif yang rendah karena dibawah 0.5 (Sugiyono, 2004:183). Nilai koefisien korelasi yang rendah tersebut mungkin disebabkan karena adanya faktor lain yang mempunyai hubungan korelasi yang lebih kuat.

### **Pembahasan Audit Intern pada PT. XYZ**

Audit Intern adalah penilai independen yang merupakan bagian dari struktur pengendalian intern perusahaan yang berfungsi menguji serta mengevaluasi keandalan dan efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan secara keseluruhan.

Standar Audit adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh unit dan auditor intern dalam melaksanakan tugasnya agar kualitas kinerja auditor dan hasil auditnya dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasi audit intern yang terdapat pada P.T XYZ atas indikator-indikator sebagai berikut:

#### **Independensi Audit Intern**

Kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor intern PT. XYZ terpisah dari kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan penyebaran kuesioner, pada variabel kelima sebanyak 23,1 % responden menyatakan setuju bila auditor intern melakukan pekerjaan secara bebas. Auditor intern dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan namun tidak secara bebas dan objektif. Terpisahnya kedudukan audit intern dengan organisasi

inti perusahaan akan menyulitkan auditor dalam melihat catatan-catatan, mewawancarai, meninjau dan memeriksa fasilitas yang digunakan oleh objek yang diperiksa.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner dapat diketahui bahwa struktur organisasi unit audit intern PT. XYZ berada pada Satuan Pengawasan Intern perusahaan yang berada langsung di bawah Direktur Utama. Auditor Intern memiliki wewenang penuh untuk melakukan audit pada semua bagian perusahaan.

#### Kecakapan Profesional

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner sebanyak 53,8 % responden setuju jika auditor intern yang terlibat di dalam kegiatan audit seharusnya memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, kecakapan serta pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Staf Audit Intern yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi dapat memperdalam pengetahuannya dengan mengikuti pendidikan khusus secara formal, baik yang ada dalam perusahaan maupun luar perusahaan.

Berdasarkan penyebaran kuesioner menunjukkan 61,5 % responden menyatakan bahwa auditor intern bekerja secara profesional. Hal ini menunjukkan adanya kerja sama antara tim audit intern dengan semua bagian yang terlibat dalam perusahaan.

#### Program audit

Audit intern di P.T. XYZ membuat perencanaan dan program pemeriksaan sebelum melaksanakan tugas, agar dapat melaksanakan pemeriksaan secara terarah dan teratur sehingga dapat selesai tepat waktu. Perencanaan tersebut harus disetujui oleh pimpinan baru dapat dilaksanakan.

#### Pelaksanaan Audit

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada P.T XYZ menunjukkan 23.1% responden menyatakan pelaksanaan audit intern kadang-kadang menghambat aktivitas divisi-divisi lain. Hal ini disebabkan karena saat pelaksanaan audit, auditor intern harus berhubungan dengan semua divisi dalam mengumpulkan bahan bukti, dokumen, dan catatan-catatan. Audit tidak akan dapat berjalan tanpa dukungan dari semua divisi yang terlibat.

#### Laporan Audit

Seluruh pencatatan transaksi dan kegiatan yang dilakukan perusahaan selalu diaudit oleh auditor intern agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan *accountable*. Auditor juga selalu melakukan pemeriksaan atas sumber-sumber daya perusahaan agar digunakan secara efektif dan efisien.

Dalam melakukan kerjanya Satuan Pengawasan Intern dapat meninjau / memperoleh dokumen, data dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan dari unit yang terkait. Para Kepala Unit agar membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

#### *Follow up* (tindak lanjut)

*Follow up* merupakan tahap akhir dari langkah kerja audit intern. Tindak lanjut merupakan keyakinan dari audit intern atas tindakan yang layak dan tepat dari hasil temuannya. Saran-saran yang diberikan dalam laporan pemeriksaan dilaksanakan oleh audit intern pada tahap tindak lanjut sehingga dapat diketahui hasil dari pelaksanaan tindak lanjut.

## **Perwujudan *A Good Corporate Governance* PT. XYZ**

### Transparansi

PT. XYZ akan menyampaikan informasi untuk dilaporkan kepada Pemegang Saham sebagai berikut :

- Laporan Triwulan, terdiri dari Laporan realisasi Perolehan Kontrak, Penjualan, Produksi, Investasi, SDM, serta Kinerja Keuangan.
- Laporan Tahunan, terdiri dari Laporan realisasi Perolehan Kontrak, Penjualan, Produksi, Investasi, SDM, serta Kinerja Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.  
Kemandirian

Direksi dan Komisaris PT. XYZ dapat memberikan pendapat yang independen dalam setiap pengambilan keputusan.  
Akuntabilitas

Agar akuntabilitas dapat berjalan maka diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Pertanggungjawaban

PT. XYZ selalu mengutamakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan, terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Setiap pihak atau bagian memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang terpisah, alokasi tanggung jawab masing-masing secara jelas tercantum dalam kebijakan peraturan perusahaan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kewajaran

PT. XYZ memberikan informasi yang wajar kepada publik, dan pemegang saham. Hubungan dengan karyawan terus dijaga yaitu dengan menghindari praktek diskriminasi, antara lain menghormati hak asasi karyawan, memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, bangsa, agama dan gender, memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang berharga.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian pada P.T. XYZ serta pembahasan yang berlandaskan teori, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Audit intern atas persediaan barang jadi pada PT. XYZ telah dilaksanakan dengan memadai. Hipotesis penelitian dapat diterima karena tingkat signifikansi menunjukkan hasil  $0.016 < 0.05$  untuk bagian yang terkait, sehingga dapat disimpulkan "Audit intern yang memadai mempunyai peranan dalam melaksanakan perwujudan *good corporate governance* yang efektif". Koefisien korelasi antara peranan audit intern dengan perwujudan GCG menunjukkan hasil 0.263, berarti antara audit intern dalam perwujudan GCG menunjukkan hubungan positif yang rendah.

2. Peranan audit intern pada PT. XYZ dalam mewujudkan *good corporate goverment* berperan secara memadai.

### **Saran**

Untuk mengatasi kelemahan yang ada pada perusahaan, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya lebih mensosialisasikan prinsip-prinsip *A Good Corporate Governance*, khususnya pada prinsip akuntabilitas dan transparansi pada semua level manajemen agar seluruh anggota organisasi dapat mengerti dan pada akhirnya dapat melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya secara lebih profesional.
2. Perusahaan membentuk lembaga khusus dalam organisasi untuk menangani implementasi dan penyempurnaan penerapan GCG.
3. Perusahaan membentuk lembaga khusus dalam organisasi untuk menangani manajemen risiko perusahaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Sukrisno, Agoes. 2003. *Tanya Jawab Praktik Auditing*. Fakultas ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.

- Hasan, Iqbal. 2003. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Irdiantoro, Nur, Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. BPFE. Yogyakarta
- IAI. 2001. *Standar Profesi Akuntan Publik*. Salemba empat: Jakarta.
- Sugiyono. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Surya, Indra. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance*. Kencana: Jakarta.
- Tugiman, Hiro. 2004. *Peranan auditor Internal dalam Menunjang Good Corporate pada BUMN Indonesia*.
- Tugiman, Hiro. 2006. *Pengenalan Manajemen Internal Audit dan Komite Audit*. YPIA: Bandung.
- Tugiman, Hiro. 2006. *Standar Profesi Internal Audit*. Eresco: Jakarta.
- Tunggal, Amin. 2007. *Corporate Governance*. Harvarindo.
- Yeh, Lee dan Woidtke. 2001. "Family Control and Corporate Governance: Evidence from Taiwan," *International Review of Finance*.
- Santoso, Singgih. 2004. *SPSS Statistika Multivariat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama